

KONSEP TEORI PEMBANGUNAN PUSAT PINGGIRAN DALAM KAJIAN GEOGRAFI

Oleh:

Nurhadi

Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik moril maupun materiil. Dengan pembangunan diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati tingkat kesejahteraan sosial yang memadai, namun kenyataannya masih banyak dijumpai masyarakat yang jauh dari sejahtera. Hal ini berarti pembangunan yang ada selama ini belum sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

Suatu kenyataan ditemukan adanya daerah-daerah yang berkembang pesat, tetapi sebaliknya masih banyak dijumpai daerah-daerah yang jauh tertinggal, seperti antara di daerah perdesaan dan perkotaan bahkan dalam skala yang lebih luas antara Jawa dan luar Jawa, antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Oleh sebab itu konsep pembangunan yang selama ini dipakai (konsep pusat pinggiran) perlu dirubah dengan konsep pembangunan yang relevan, sebab konsep pusat pinggiran ternyata lebih banyak menguntungkan daerah pusat (core) dan merugikan daerah pinggiran (periphery), walaupun sudah membagi wilayah Indonesia menjadi 5 wilayah pembangunan utama. Justru di beberapa wilayah muncul ketidak seimbangan yang sangat menyolok antara daerah pusat dan daerah pinggiran.

Kata kunci: Pembangunan, Daerah Pusat, Daerah Pinggiran

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam UUD 45, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (GBHN 1998). Dengan pembangunan diharapkan seluruh masyarakat di tanah air menikmati tingkat kesejahteraan yang memadai. Namun kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat heterogen, berbeda dalam segala hal. Demikian pula tingkat ekonominya, ada yang telah berkecukupan dan dapat menikmati hasil pembangunan secara layak, namun tidak sedikit juga yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini berarti pembangunan selama ini belum sepenuhnya mencapai sasaran yang diharapkan. Perbedaan hasil pembangunan ini diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain: perbedaan sumberdaya yang dimiliki daerah yang satu dengan yang lain, perbedaan kemampuan

sumberdaya manusianya, tingkat penguasaan teknologi yang berbeda, kebijakan pemerintah terlalu mengutamakan pembangunan di Pulau Jawa (Wilayah Barat) dan lain-lain.

Hal ini dapat disaksikan adanya daerah-daerah yang berkembang pesat (Wilayah Barat), dan menarik banyak orang untuk mengadakan nasib. Daerah itu pada umumnya merupakan kota-kota besar yang sekaligus sebagai Ibukota Propinsi atau Ibukota suatu Kabupaten, karena berkedudukan sebagai pusat kekuasaan maka ada tendensi pembangunan terkonsentrasi di kota tersebut. Kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan lain-lain tiada henti-hentinya membangun jalan raya, perkantoran, permukiman, tempat-tempat hiburan, pasar dan sarana pendidikan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut diperlukan material atau bahan bangunan, peralatan, kendaraan pengangkut dan orang untuk melaksanakan pembangunan, kemudian orang berbondong-bondong ke kota mengisi lowongan kerja di berbagai sektor pembangunan, dengan demikian ***Kota tumbuh menjadi pusat pembangunan.*** Sayangnya tidak semua pendatang dapat menikmati hasil pembangunan. Bagaimanapun jumlah pendatang dengan kebutuhan tenaga tidak seimbang atau kebanyakan kemampuan pendatang yang rendah dilihat dari segi kualitasnya sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan dunia kerja. ***Kelompok pendatang inilah yang kemudian tersingkir ke pinggiran kota.*** Gejala pusat pinggiran dalam pembangunan muncul dan melahirkan beberapa pendapat dari beberapa para ahli yang mengamati dan memperdalam gejala ini. Hal ini perlu dipelajari karena gejala pusat pinggiran tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi berlaku untuk seluruh dunia. Dari berbagai fenomena di berbagai belahan dunia dapat ***dipetik Pelajaran*** agar tidak terulang hal-hal yang bersifat negatif. Apalagi ***gejala pusat pinggiran ini telah lama terjadi*** sehingga dapat menjadi ***guru terbaik*** bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

2. GEJALA PUSAT PINGGIRAN DALAM LINTASAN SEJARAH

Konsep pusat pinggiran dinyatakan dalam berbagai pandangan oleh ilmuwan sosial. Salah satu gejala pusat pinggiran telah disampaikan oleh John Friedman (1966), Ia membagi dunia ini menjadi dua bagian besar yaitu ***Pusat yang dinamis dan pinggiran yang statis***, dan mengusulkan 4 wilayah sebagai berikut :

1. ***Daerah Pusat*** adalah dikonsentrasikan perekonomian metropolitan dengan kapasitas tinggi untuk inovasi dan perubahan. Nampak seperti jaringan hirarkhi dari Ibukota Negara samapai daerah terpencil. ***Pada tingkat dunia*** Eropa dan Amerika Utara merupakan pusat daerah pengembangan di dunia barat.
2. ***Daerah Peralihan Atas*** adalah berbatasan dengan pusat, cocok bagi pengembangan dan eksploitasi sumberdaya. Ciri khas Daerah peralihan atas ialah pengembangan disepanjang jalan raya dua kota besar contoh dalam skala dunia adalah daerah antara Rio de Jenairo dan Sao Paulo.
3. ***Daerah Batas Sumber Daya*** adalah wilayah pinggiran permukiman baru, sebagai contoh Permukiman dilereng utara Alaska.

4. **Daerah Peralihan bawah** adalah daerah yang stagnasi atau menurun kemampuannya, contohnya adalah daerah perekonomian perdesaan dan permukiman liar di perkotaan.

Dalam catatan sejarah abad XV Spanyol dan Portugis memulai suatu perekonomian dunia yang terpadu. Didorong perkembangan dalam persenjataan dan pembangunan kapal, Spanyol melebar kemaharajaannya ke Amerika Tengah dan Andes didasarkan pada penambangan logam-logam mulia yang dikerjakan dengan tenaga paksa (Dean Forbes, 1991).

Negara Eropa lainnya yang berlomba menjadi daerah pusat untuk waktu-waktu selanjutnya adalah Inggris, Perancis dan Jerman. Inggris terlihat mulai mendominasi perdagangan di Benua Amerika pada akhir abad ke XII. Revolusi industri membawa perubahan pada kedudukan Inggris dalam perekonomian dunia. Industri tekstil menjadi primadona dan menjadi penghasil terbesar bagi Inggris. Oleh karena itu Inggris berusaha mengamankan perdagangan tekstilnya dengan membangun Angkatan Laut yang kuat dan mengawasi lautan dunia. Perancis menggunakan *Momentum Revolusi Sosial* untuk berusaha menjadi pusat pengembangan dunia agar sejajar dengan negara-negara tetangganya seperti Inggris dan Belanda. Atas dasar kesamaan hak untuk hidup lebih baik maka Perancis mulai merebut daerah-daerah pinggiran milik Inggris, baik di Afrika maupun di Asia (Vietnam, Kamboja, Laos). Sedangkan Jerman ingin menjadi pusat dunia berlandaskan pada politik Rasial (Nazi) yang mersa menjadi bangsa unggul dan berhak menindas bangsa lain, tanpa malu-malu Jerman menganeksasi negara tetangganya. Bersama Amerika Serikat, Jerman muncul sebagai kekuatan industri utama, khususnya dalam industri baja.

Tahun 1890-an disebut awal zaman imperialisme, terjadi tiga proses yang saling berhubungan dan yang menentukan serta membentuk masa depan dunia bahkan hingga abad ini.

Pertama peningkatan kolonisasi yang cepat oleh beberapa negara, mungkin karena permusuhan politik atau desakan surplus modal yang mencari tempat investasi. Inggris dan Perancis memasukkan daerah-daerah di Pasifik, Asia Tenggara dan Afrika kedalam koloni mereka. Rusia memperoleh sebagian Persia. Jerman, Italia dan Belgia merebut bagian-bagian Afrika. Amerika Serikat menduduki Alaska, Filipina dan sebagian Kepulauan Pasifik. Jepang menjajah Formosa (Taiwan) dan Belanda meluaskan jajahannya di Hindia Belanda Timur.

Kedua adalah terjadinya pergeseran dari modal kompetitif ke arah modal monopoli. Dalam pertengahan abad ini perdagangan bebas cocok untuk perusahaan kapitalis yang kompetitif dan kolonialisme tidak begitu dibutuhkan. Tetapi ketika Inggris kehilangan keuntungan produktifnya dan menginginkan keamanan sumber-sumber suplai bahan mentahnya serta jaminan pembayaran barang-barang ekspor, maka monopoli dan kolonialisme diperlukan kembali.

Ketida peningkatan ekspor modal Eropa keluar negeri samapi 577 % antara tahun 1874 dan 1913. Ekspor modal ini pada gilirannya memberikan keuntungan besar kepada Inggris, Perancis dan Jerman dan negara-negara lain (Dean Forbes, 1991).

3. TEORI PUSAT PINGGIRAN

A. Myrdal, Hirschman

Hirschman adalah seorang penganjur teori pertumbuhan tidak seimbang. Secara geografis, pertumbuhan ekonomi pasti tidak seimbang. Dalam proses pertumbuhan tidak seimbang selalu dapat dilihat bahwa kemajuan disuatu tempat (titik) menimbulkan tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan, dan dorongan-dorongan kearah perkembangan pada tempat-tempat (titik-titik) berikutnya. Hirschman (1958), menyadari bahwa fungsi-fungsi ekonomi berbeda tingkat intensitasnya pada tempat yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi diutamakan pada titik originalnya sebelum disebarkan ke berbagai tempat lainnya. Ia menggunakan istilah **Titik Pertumbuhan (*Growing Point*)** atau **Pusat Pertumbuhan (*Growing Centre*)**.

Di suatu negara terdapat beberapa titik pertumbuhan, dimana industri berkelompok ditempat itu, karena diperoleh beberapa manfaat dalam bentuk penghematan-penghematan dan kemudahan-kemudahan. Kesempatan investasi, lapangan kerja dan upah buruh relatif tinggi lebih banyak terdapat di pusat-pusat pertumbuhan dari pada daerah belakang. Antara pusat dan daerah belakang terdapat ketergantungan dalam suplai barang dan tenaga kerja. Pengaruh yang paling hebat adalah migrasi penduduk ke kota-kota besar (urbanisasi) akan dapat mengabsorbsikan tenaga kerja yang trampil dan pihak lain akan mengurangi pengangguran tidak kentara di daerah belakang. Hal ini tergantung pada tingkat kplementaritas antara dua tempat tersebut.

Jika komplementaritas kuat akan terjadi proses penyebaran pembangunan kedaerah-daerah belakang (*trikling down*) dan sebaliknya jika komplementaritas lemah akan terjadi pengaruh polarisasi (Keban, 1995). Jika pengeruh polarisasi lebih kuat dari pengeruh penyebaran pembangunan maka akan timbul *masyarakat dualistik, yaitu selain memiliki ciri-ciri daerah perkotaan modern juga memiliki daerah perdesaan terbelakang* (Hammand,1985, Indra Catri,1993). Walaupun terlihat suatu kecenderungan yang suram namun Hirschman optimis dan percaya bahwa pengaruh *trikling-down* akan mengatasi pengaruh polarisasi. Misalnya bila daerah perkotaan berspesialisasi pada industri dan daerah perdesaan berspesialisasi pada produksi primer, maka meluasnya permintaan daerah perkotaan harus mendorong perkembangan daerah perdesaan, tetapi apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Pada khususnya ada kemungkinan besar bahwa elastisitas penawaran jangka pendek di daerah perdesaan adalah sedemikian rendah sehingga dasar pertukaran akan berubah merugikan daerah perkotaan. Dalam jangka panjang penghematan-penghematan ekstrnal dan tersedianya komplementaritas di pusat-pusat akan menjamin penyebaran pembangunan ke daerah-daerah disekitarnya.

Pada pihak lain, berdasarkan konseptual yang serupa mengenai struktur titik-titik pertumbuhan dan daerah-daerah belakang, Myrdal (1957) menggunakan istilah ***Backwash effect dan spread effect*** yang artinya persis serupa dengan polarisasi dan pengaruh *trikling down*. Namun demikian, dalam penekanan pembahasan dan kesimpulan-kesimpulan terdapat perbedaan yang cukup besar. Analisa Myrdal

memberikan kesan pesimistis, ia berpendapat bahwa *polarisasi muncul lebih kuat dari pada penyebaran pembangunan*, permintaan faktor-faktor produksi akan menumpuk di daerah- daerah perkotaan yang memberikan manfaat kepadanya, dan sebaliknya di daerah perdesaan yang tidak menguntungkan akan menipis.

Pesimisme tersebut dapat dimaklumi karena Myrdal tidak memaklumi bahwa timbulnya titik pertumbuhan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dan merupakan syarat bagi perkembangan selanjutnya dimana-mana. Pusat pemikiran Myrdal pada kausasi kumulatif menyebabkan ia tidak dapat melihat dengan titik balik apabila perkembangan kearah polarisasi di suatu wilayah sudah berlangsung untuk beberapa waktu. Kausasi sirkuler kumulatif selalu menghasilkan penyebaran pembangunan yang lemah dan tidak pemerataan, *atau dapat dikatakan bahwa mobilitas akan memperbesar ketimpangan pendapatan dan migrasi akan memperbesar ketimpangan regional*.

Berdasarkan pada perbedaan pandangan diatas, maka kebijaksanaan perspektif yang dianjurkan oleh Hirschman dan Myrdal berbeda pula. **Hirschman menyarankan** agar membentuk lebih banyak titik-titik pertumbuhan supaya dapat menciptakan pengaruh-pengaruh penyebaran pembangunan yang efektif, sedangkan **Myrdal** menekankan pada langkah-langkah kebijaksanaan untuk melemahkan *backwash effects dan meperkuat sread effeetc* agar proses kausasi sirkuler kumulatif mengarah keatas, dengan demikian semakin memperkecil ketimpangan regional (Murtomo, 1988, Indra Catri, 1993, Keban, 1995).

Gunnar Myrdal (1957) dan Aschman (1958) dalam Keban (1995), menyerang pengertian equilibrium dalam teori ekonomi dan mengemukakan ide-ide dasar tentang polarisasi pembangunan. Menurut pandangan Myrdal, daerah-daerah inti dari perekonomian adalah magnit penguat dari kemajuan. Myrdal mengemukakan bahwa setelah pertumbuhan dimulai pada lokasi yang dipilih pada perekonomian bebas, arus masuk tenaga kerja, ketrampilan, modal dan komoditi berkembang secara spontan untuk mendukungnya. Tetapi arus ini meliputi efek backwash, ketidak samaan antara daerah-daerah yang berkembang dengan daerah-daerah lain.

Daerah-daerah yang sedang tumbuh mempengaruhi daerah-daerah lain melalui dua kekuatan yang berlawanan , menurut model Myrdal disebut Effect backwash dan efek penyebaran (*Spread effect dan backwash effect*). Efek penyebaran menunjukkan dampak yang menguntungkan dari daerah-daerah yang makmur terhadap daerah-daerah yang kurang makmur, hal ini meliputi : meningkatnya permintaan komoditi primer, investasi dan difusi ide serta tehnologi. Dalam banyak negara-negara terbelakang, efek penyebaran terbatas pada daerah-daerah disekitar pusat-pusat herarkhi perkotaan (Murtomo, 1988, Keban, 1995).

Hirschman membantah bahwa memilih dan memusatkan aktivitasnya pada titik-titik pertumbuhan adalah alami bagi para pengusaha. Pembangunan lama kelamaan tidak berimbang, pertumbuhan daerah yang sedang berkembang membatasi kapasitas

pertumbuhan dimana-mana. Utara (*North*) menarik tenaga trampil dan tabungan dari selatan (*south*). Elastisitas permintaan income lebih besar untuk barang-barang buatan north, dan oleh karena itu syarat-syarat perdagangan melawan produsen south akan komoditi primernya (Jhingan, M.L. 1993, Arsyad, 1988).

Ide pokok dari model Hirschman adalah bahwa efek polaritas disebabkan oleh “*effect trickling down*”, ekuivalen dengan efek penyebaran dari Myrdal. Effect trickling down meliputi tujuan komoditi North yang diproduksi di South dan gerakan modal keselatan, disamping North dapat menarik tenaga selatan yang cukup untuk menjamin meningkatnya produktivitas tenaga kerja marjinal dan tingkat konsumsi perkapita South. Hirschman bersikeras bahwa effect trickling down hanya bisa terjadi bila di North membutuhkan South untuk ekspansinya sendiri.

B. FRIEDMAN

John Friedman, Weaver, (1979) menganalisa aspek tata ruang, lokasi serta persoalan-persoalan kebijaksanaan dan perencanaan pengembangan wilayah dalam ruang lingkup yang lebih general. Friedman telah menampilkan teori daerah inti. Disekitar daerah inti terdapat daerah-daerah pinggiran atau *periphery region*. Daerah pinggiran ini sering disebut pula daerah pedalaman atau daerah-daerah sekitarnya.

Pembangunan dipandang sebagai proses inovasi yang diskontinu tetapi kumulatif yang berasal dari sejumlah kecil pusat-pusat perubahan, yang terletak pada titik-titik interaksi yang mempunyai potensi tertinggi. Pembangunan inovatif cenderung menyebar kebawah dan keluar dari pusat-pusat tersebut ke daerah yang mempunyai potensi interaksi yang lebih rendah.

Pusat-pusat besar pada umumnya berbentuk kota-kota besar, metropolis atau megapolis, dikategorikan sebagai daerah inti, dan daerah-daerah yang relatif statis sisanya merupakan daerah pinggiran. Wilayah pusat merupakan subsistem dari kemajuan pembangunan yang ditentukan oleh lembaga di daerah inti dalam arti bahwa daerah pinggiran berada dalam suatu hubungan ketergantungan yang substansial. Daerah inti dan wilayah pinggiran bersama-sama membentuk sistem spasial yang lengkap (Indra Catri, 1993, Murtomo, 1988).

Proses daerah inti mengkonsolidasikan dominasinya terhadap daerah pinggiran dilaksanakan melalui pengaruh-pengaruh umpan balik pertumbuhan daerah inti, yang terdiri dari **pengaruh dominasi** (melemahnya ekonomi daerah pinggiran sebagai akibat dari mengalirnya sumberdaya alam, manusia dan modal ke wilayah inti), **pengaruh informasi** (peningkatan dalam interaksi potensial untuk menunjang pembangunan inovatif), **pengaruh psikologis** (penciptaan kondisi yang menggairahkan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan inovatif secara lebih nyata), **pengaruh mata rantai** (kecenderungan inovasi untuk menghasilkan inovasi lainnya), dan **pengaruh produksi** (penciptaan sturur balas jasa dan menarik untuk kegiatan-kegiatan inovatif).

Gunder Frank (1969; 1970) dalam Keban (1995), membagi 4 tingkatan model evolusi keruangan (evolusi spasial), sebagai berikut :

1. **Pre-industrial phase**, dicirikan oleh pusat kota tersebar pada areal yang luas, tidak ada tingkatan kota. Kemungkinan untuk tumbuh kecil, perekonomian tidak berkembang. Friedman berasumsi sistem dalam keadaan stabil sebab pusatnya luas dan hanya bersifat lokal.
2. **Pereode Incipient industrialization**, dicirikan oleh kota primate yang mendominasi kawasan yang luas dan menggali sumberdaya alam sekitarnya. Perekonomian didaerah periphery bergerak menuju kota primate berupa pendatang, intelektual dan tenaga kerja. Friedman berpendapat pengelolaan ruang tidak stabil, sebab sistem digerakkan oleh kekuatan luar.
3. **Transisional stade kearah industri kota primate** masih mendomisi kota yang luas, pengembangan strategi penetapan pusat kota atau pusat pertumbuhan mengurangi pengaruh kota yang luas, Friedman setuju bahwa tingkat ketiga masih bersifat tidak stabil.
4. **Fase kota dengan organisasi keruangan yang sempurna**, kota-kota yang secara fungsional saling tergantung. Seluruh ruang nasional terintegrasi sedemikian rupa sehingga “tidak adalagi periphery” yang terbelakang dan belum berkembang.

Jadi menurut Friedman tingkat urbanisasi sebagai indikator tingkatan kemajuan suatu wilayah; makin maju tingkat ekonomi suatu kota, semakin tinggi tingkatan urbanisasi, sehingga makin terintegrasi keruangan ekonomi keruangannya, dan akhirnya makin berkurang perbedaannya dalam pembangunan.

4. GEJALA PUSAT DAN PINGGIRAN DI INDONESIA

Indonesia dibagi dalam berbagai daerah tingkat I (30 Propinsi saat sekarang) dan ratusan daerah tingkat II menyadarkan bahwa betapa variasinya kondisi wilayah Indonesia. Sebaran penduduk yang tidak merata (sebagain besar terkonsentrasi di Pulau Jawa), sumberdaya alam yang tersebar, tingkat penguasaan tehnologinya yang beragam, dapat dibayangkan betapa sulitnya membuat kebijakan pembangunan yang dapat memenuhi selera setiap orang dan memuaskan semua pihak. Oleh karena itu dalam GBHN 1998 sebagai pegangan seluruh bangsa Indonesia untuk melaksanakan Pembangunan Jangka Panjang kedua, berkenaan dengan keadaan kondisi daerah mengamanatkan sebagai berikut :

Pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional telah makin mendorong dan meningkatkan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan dan pengembangan daerah serta peran serta dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan upaya pembangunan daerah harus senantiasa didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dalam rangka lebih meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan, dan mendorong pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya diseluruh tanah air.

Lebih lanjut dalam Pembangunan Lima Tahun Keenam diamanatkan sebagai berikut: Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyasikan laju pertumbuhan

antar daerah, antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan serta membukan daerah terisolasi dan mempercepat pembangunan Kawasan Timur Indonesia, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah serta melalui pembangunan potensi daerah seoptimal mungkin. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan perlu dikembangkan melalui pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah, khususnya daerah otonom, dengan tetap mengacu pada upaya perwujudan Wawasan Nusantara.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa adanya kesadaran perbedaan antar daerah seperti antara daerah perkotaan dan perdesaan, daerah terpencil yang memerlukan penanganan secara khusus karena daerah-daerah tersebut mempunyai ciri tersendiri layaknya daerah pusat dan daerah pinggiran. ***Oleh sebab itu sejak tahun 1974, telah menerapkan konsep teori pembangunan dengan cara membagi-bagi Wilayah Indonesia menjadi Wilayah pembangunan utama yang mencakup Wilayah pembangunan ekonomi***, yaitu sebagai berikut :

- Wilayah Pembangunan Utama A : Pusat Utama, Medan
- Wilayah Pembangunan Utama B : Pusat Utama Jakarta
- Wilayah Pembangunan Utama C : Pusat Utama Surabaya
- Wilayah Pembangunan Utama D Pusat Utama Ujung Pandang (Makassar sekarang)
- Sejak Pelita IV Pusat Pembangunan utama D dipecah menjadi 2 sehingga muncul Wilayah Pembangunan Utama E dengan Pusat Utama Ambon.

Masing-masing wilayah pembangunan dipecah lagi menjadi sub-sub Wilayah Pembangunan yang lebih kecil untuk menjadikan kerja sama antar daerah lebih dapat dikembangkan, hasilnya dapat disaksikan sekarang kota-kota yang dijadikan sebagai pusat utama pembangunan menjadi berkembang sangat pesat dan menjadi inti dari daerah-daerah sekitarnya. Ibarat gula, kota-kota itu diserbu semut penduduk yang ingin ikut menikmati manisnya pembangunan. Seperti dijelaskan di depan bahwa setiap wilayah pembangunan dibagi lagi menjadi wilayah- wilayah pembangunan yang lebih kecil. Sebagai contohnya disajikan pembagian yang ada di Jawa Barat:

Wilayah pembangunan Jabotabek (perbatasan dengan Jakarta, yakni Tangerang ,Bogor dan Bekasi) dan sebagian daerah Sukabumi. Disitu ditampung berbagai industri yang tak tertampung diJakarta. Dengan demikian Indonesia secara sadar sudah menggunakan konsep pusat-pusat pertumbuhan atau pusat-pusat pengembangan,namun tetap memperhatikan daerah pinggiran (desa, terpencil), hanya yang perlu lebih diperhatikan bahwa, ***dimasa yang akan datang perlu mempercepat pembangunan di daerah pheriphery, khususnya daerah perdesaan maupun dalam skala yang luas yaitu pembangunan di luar Pulau Jawa terutama di Kawasan Timur Indonesia.***

5. Penutup

Dari uraian tentang gejala pusat pinggiran mulai dari prespektif sejarah, sampai dengan keberadaanya di negara yang sedang berkembang, dan beberapa teori yang disampaikan oleh para ahli, dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan di Indonesia maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Daerah pusat dan pinggiran dapat tumbuh karena berbagai alasan seperti alasan Politis, Ekonomis dan alami (geografis).
- Keberadaan daerah pusat dan pinggiran saling membutuhkan, karena keduanya saling tergantung, daerah pinggiran dapat berkembang banyak ditentukan oleh daerah pusat melalui *spread effect*, dan pada akhirnya daerah pinggiran suatu saat akan berintegrasi dengan daerah pusat.
- Indonesia secara sadar telah menerapkan konsep pusat pinggiran, tetapi dimasa lalu lebih banyak mengutamakan pembangunan daerah pusat, sehingga banyak terjadi ketimpangan hasil pembangunan antara daerah pusat dan pinggiran, seperti antara kota dan desa maupun antara Jawa dan luar Jawa lebih-lebih untuk Kawasan Timur Indonesia. Oleh sebab itu perlu meninjau kembali kebijakan yang selama ini dijalankan dan lebih banyak memberikan kesempatan kepada daerah pinggiran untuk menata diri dalam arti yang seluas-luasnya.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln, 1988; *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Forbes Dean K. 1991, *Geografi keterbelakangan*. Jakarta : LP3ES.
- Freidmann, John and Clyde Weaver. 1979. *Territory and Function: the Evolution of Regional Planning*. Berkeley: University of California Press.
- Hammond, Charles Whyone. 1985; *Element of Human Geography*. London : George Allen & UNWIN.
- Indra Catri, 1993; *Teori dan Institusi Pengembangan Wilayah*. Institut Teknologi Bandung.
- Jhingan, M.L. 1993; *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremias, T. 1995; *Pembangunan Regional (Hand Out)*. Yogyakarta : Fak. Pasca Sarjana UGM.
- Murtomo, 1988; *Regional and Rural Development Planning Series*. Yogyakarta : UGM.

